

Dekan UGM Meninggal Setelah Mobilnya Menabrak Truk di Tol Cipali

PURWAKARTA (IM) - Dekan Fakultas Peternakan UGM, I Gede Suparta Budisatria, meninggal dunia setelah mengalami kecelakaan lalu lintas di Jalan Tol Cipali, Kamis (4/11). Jenazah korban dievakuasi ke Rumah Sakit Abdul Radjak, Purwakarta.

Kecelakaan terjadi saat korban dalam perjalanan menuju Jakarta, guna mengurus visa untuk berangkat ke Eropa dalam rangka mengikuti kegiatan ilmiah di Eropa. "Mau ke Jakarta mengurus visa," ujar Made, keluarga korban, Kamis (4/11).

Saat kejadian, diduga korban mengalami benturan yang cukup keras, usai mobil yang di tumpangnya menabrak truk yang berada di depannya. Kecelakaan terjadi saat kendaraan minibus Toyota Innova dengan nomor polisi AB 1969 PY melaju kencang dari arah Palimanan menuju Jakarta. Saat melintas di kilometer 113 wilayah Cibogo, Subang, kendaraan oleng dan menabrak truk di depannya hingga ringsek.

Sementara kendaraan yang tertabrak kabur. Usai disemayamkan, jenazah korban langsung dibawa ke Yo-

gakarta untuk dimakamkan. Selain menyebabkan korban jiwa, tiga orang lain termasuk pengemudi mengalami luka-luka. Mereka dirawat di RS Abdul Radjak, Purwakarta. Penyebab kecelakaan masih diselidiki polisi, dan kasus ini ditangani satlantas Polres Subang.

Menurut Kabag Humas UGM, Iva Ariani berdasarkan informasi, rombongan Dekan UGM berada dalam satu mobil. Prof Gede berada di kursi depan di samping sopir fakultas Fapet UGM, Jumari. Sedangkan mantan dekan Fapet, Prof Ali Agus dan dosen lainnya Hanim berada di baris kedua dan hanya mengalami luka ringan. "Mohon doanya, semoga diberikan yang terbaik. Kami masih fokus untuk pemulangan," kata Iva.

Rencananya almarhum Prof Gede akan disemayamkan di Balairung UGM, pukul 14.00 atau pukul 15.00 WIB sesuai dengan jadwal kepulangan.

Kemungkinan juga akan dimakamkan di Tempat Pemakaman UGM di Sawitri, namun untuk kepastian masih menunggu dari keluarga. ● han

Jangan Lengah Terapkan Prokes Meski Kasus Covid-19 Cukup Rendah

JAKARTA (IM) - Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto meminta masyarakat tidak lengah dalam menerapkan protokol kesehatan kendati kasus Covid-19 saat ini terbilang cukup rendah. Hal tersebut ia sampaikan saat meninjau vaksinasi massal bersama Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo di Banda Aceh, Selasa (2/11).

"Indonesia tidak boleh lengah walaupun kasus Covid-19 yang cukup rendah saat ini. Negara-negara lain sudah membuktikan, saat kasus rendah dan tidak lagi disiplin protokol kesehatan, maka terjadi lagi lonjakan kasus," ujar Hadi, dalam keterangan tertulis, Selasa (2/11).

Seperti diketahui saat ini seluruh dunia, termasuk sejumlah negara di Eropa yang telah melaksanakan vaksinasi, saat ini sedang mengalami lonjakan kasus Covid-19. Hal ini disuga karena relaksasi kegiatan yang telah diterapkan ternyata tidak diikuti penerapan protokol kesehatan yang ketat. Akibatnya, walaupun vaksinasi sudah dilaksanakan secara massif, namun lon-

jakan kasus masih terjadi. "Artinya disiplin protokol kesehatan 3M adalah kunci dari penanganan pandemi," katanya.

Hadi mengingatkan, Indonesia harus waspada. Sebab, data menunjukkan, 92 persen dari total pemeriksaan saat ini merupakan testing dalam rangka screening perjalanan. Selain itu, Hadi juga menyampaikan bahwa untuk menekan laju penularan, kontak erat harus segera melakukan karantina. Kemudian semua kontak erat yang terlacak harus melaksanakan entry dan exit test.

Menurut data dari Satgas Penanganan Covid-19, di Provinsi Aceh, tren kenaikan kasus konfirmasi terjadi di Kota Sabang, Kabupaten Aceh Tenggara, dan Kabupaten Bireun. Kota Banda Aceh sendiri telah mencapai 82 perseb dan ini adalah capaian yang sangat baik, mengingat Kota Banda Aceh adalah pusat perekonomian dengan jumlah penduduk yang cukup besar dan mobilitas masyarakat yang cukup tinggi, termasuk dari luar Kota Banda Aceh. ● mar

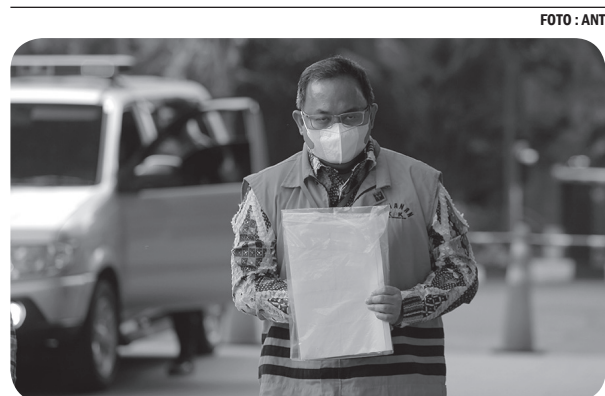


FOTO: ANT

PEMERIKSAAN DODI REZA ALEX

Tersangka mantan Bupati Musi Banyuasin Dodi Reza Alex bersiap menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Kamis (4/11). KPK memeriksa Dodi Reza Alex sebagai tersangka terkait kasus dugaan suap proyek infrastruktur di Kabupaten Musi Banyuasin.

Elite Gerindra Kaget Relawan Deklarasikan Prabowo-Puan

JAKARTA (IM) - Ketua Harian Partai Gerindra Sufni Dasco Ahmad mengaku kaget mendengar ada kelompok relawan yang mendeklarasikan dukungan terhadap pasangan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Ketua DPR Puan Maharani untuk berlaga pada Pemilihan Presiden 2024 mendatang.

Dasco mengatakan, deklarasi itu mengagetkan karena deklarasi tersebut mendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden yang berbeda partai.

"Kita kaget juga ada yang sudah mendahului partai justru relawannya sudah berkoalisi, tapi kita terus terang tidak tahu dan mudah-mudahan saja bahwa deklarasi kemarin itu maksudnya baik," kata Dasco di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (4/11).

Wakil ketua DPR itu menuturkan, partainya juga menganggotakan deklarasi tersebut tidak lazim karena digelar jauh-jauh hari sebelum penyelenggaraan Pilpres 2024. Saat ditanya kemungkinan Gerindra berkoalisi dengan PDI-P, Dasco mengatakan

partainya masih fokus pada konsolidasi internal partai.

Ia menyebutkan, hingga saat ini sudah ada sekitar 25 dewan pimpinan daerah Partai Gerindra yang meminta Prabowo untuk maju sebagai calon presiden. "Pada waktunya kita akan tentukan apakah Pak Prabowo maju dan apakah kemudian Pak Prabowo menerima lalu kemudian calon dari Partai Gerindra kita akan declare," ujar Dasco.

Diberitakan, sejumlah relawan yang mengatasnamakan Poros Prabowo-Puan mendeklarasikan dukungan kepada Prabowo dan Puan untuk maju sebagai calon presiden dan wakil presiden pada Pilpres 2024 mendatang.

"Kami terpancing untuk menghimpun dan menyatukan visi, misi dan tekad untuk tampil dan bergerak bersama dalam mengambil bagian untuk mendorong agar terwujudnya kedua tokoh bangsa tersebut, menjadi pasangan calon presiden dan wakil presiden RI periode 2024-2029," kata Deklarator Poros Prabowo-Puan, Andianto di Matraman, Jakarta, Rabu (3/11). ● me

2 Polhukam

IDN/ANTARA



PERSIAPAN PMI MENGHADAPI LA NINA

Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) Jusuf Kalla (kanan) meninjau kesiapan armada saat apel kesiapsiagaan PMI menghadapi bencana dampak La Nina di Jakarta, Kamis (4/11). Apel tersebut bertujuan untuk melaksanakan langkah-langkah antisipatif dalam menghadapi La Nina yang di prediksi akan berlangsung dari akhir tahun hingga Februari 2022.

Andika akan Jalani *Fit and Proper Test* Calon Panglima oleh Komisi I DPR 2 Hari

Dalam 4 hari ke depan diperkirakan sudah ada keputusan DPR untuk calon Panglima TNI. Jenderal Andika Perkasa merupakan calon tunggal yang diajukan Presiden Jokowi.

JAKARTA (IM) - Ketua DPR RI Puan Maharani menyebutkan, pelaksanaan uji kelayakan dan kepatutan (*Fit and Proper Test*) calon Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa oleh Komisi I DPR RI akan dilaksanakan selama dua hari yakni Kamis (4/11) dan Jumat (5/11).

Menteri Sekretaris Negara Pratikno saat memberikan Surat Pratikno (Surpres) usulan Calon Panglima TNI pada Rabu (3/11) berharap DPR RI segera memprosesnya.

Puan Maharani mengatakan pihaknya segera merespons Surat Presiden (Surpres) tentang calon Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa dengan melakukan prosedur yang ada.

"Begitu Surpres diterima hari ini, Badan Musyawarah DPR langsung menggelar rapat dan menjadwalkan *fit and proper test* calon Panglima TNI Kamis sampai dengan Jumat," ujar Puan Maharani.

Bamus DPR ini nantinya memutus hasil uji kelay-

akan dan kepatutan calon Panglima TNI akan segera dibawa ke Rapat Paripurna DPR pada 8 November 2021.

"Jadi dalam 5 hari ke depan sudah ada keputusan DPR untuk calon Panglima TNI," jelas Puan Maharani.

Sesuai UU TNI, persetujuan DPR RI terhadap calon Panglima yang diusulkan oleh Presiden, disampaikan kepada Presiden paling lambat 20 (dua puluh) hari, tidak termasuk masa reses, terhitung sejak permohonan persetujuan calon Panglima diterima oleh DPR RI.

"Jadi kalau prosesnya bisa lebih cepat, tentu lebih baik," katanya.

Dinilai Berpengalaman
Wakil Presiden RI ke 10 dan 12, Muhammad Jusuf

Kalla (JK) menanggapi usulan Presiden Jokowi yang mengajukan nama KSAD Jenderal Andika Perkasa menjadi Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) menggantikan Marsekal Hadi Tjahjanto.

JK menegaskan, pihaknya akan mendukung langkah Presiden Jokowi tersebut.

"Kita dukunglah apapun Presiden Jokowi usulkan. Kita dukung secara moral," kata JK melalui keterangan tertulis yang diterima wartawan, Kamis (4/11).

Pernyataan itu dikemukakan JK usai memimpin apel kesiapsiagaan PMI dalam menghadapi dampak musibah La Nina di Gudang Markas PMI, Jalan Gatot Subroto,

Jakarta Selatan. JK menilai, sosok Andika Perkasa yang saat ini menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) ini merupakan jenderal yang berpengalaman.

"Apalagi beliau sudah pengalaman, dan kekar lagi," katanya.

Sebagai informasi, Presiden Jokowi mengajukan nama KSAD Jenderal TNI Andika Perkasa sebagai Panglima TNI ke DPR. Surat presiden (Surpres) mengenai itu dikirim ke Senayan, kemarin, Rabu (3/11). Usai menerima Surpres tersebut, DPR akan segera menggelar *fit and proper test* kepada yang bersangkutan untuk kemudian mendapatkan persetujuan. ● me

Mahfud Minta Penegak Hukum Waspadai Industrialisasi Hukum

JAKARTA (IM) - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD meminta penegak hukum mewaspadai potensi industrialisasi hukum dalam penerapan restorative justice atau keadilan restoratif. Di mana penerapan keadilan restoratif dikhawatirkan menjadi sarana transaksional baru dalam penyelesaian perkara.

"Perlu diwaspadai adalah penerapan keadilan restoratif yang berpotensi menjadi sarana transaksional baru dalam penyelesaian perkara," ujar Mahfud, saat memberikan keynote speech virtual pada acara Focus Grup Discussion (FGD) bertema "Penyamanan Persepsi Aparat Penegak Hukum Terkait Penegakan Hukum Pidana dalam Perspektif Keadilan Restoratif," Kamis (4/11).

Mahfud mengatakan, praktik industrialisasi hukum dibuat oleh orang yang ingin mengambil keuntungan dari

proses hukum itu. "Ada juga kasus pidana, perdata dijual, kasus perdata dibelok jadi pidana," kata Mahfud.

Selain itu, Mahfud menegaskan, keadilan restoratif yang diterapkan Polri, Kejaksaan dan Mahkamah Agung perlu disambut baik sebagai salah satu terobosan dalam mengatasi problematika sistem peradilan pidana.

"Antara lain dalam mengatasi luapan narapidana di lembaga pemasyarakatan karena hukuman penjara yang masih menjadi model penghukuman favorit dari peradilan," katanya. Dalam penerapan keadilan restoratif, Mahfud mengatakan, hal lain yang perlu diperhatikan adalah koordinasi antara Polri dan Kejaksaan pada saat penerapan keadilan restoratif. Terutama dalam setiap tahapan penanganan perkara yang menjadi tanggung jawab dan wewenang masing-masing. ● han

Edukasi Protokol Kesehatan Dimulai dari Sekolah akan Lebih Efektif

JAKARTA (IM) - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan, edukasi tentang protokol kesehatan (prokes) pada masa pandemi Covid-19 harus dimulai dari sekolah menyusul dimulainya kembali pembelajaran tatap muka (PTM).

Menurutnya, edukasi tentang protokol kesehatan sejak dari sekolah akan lebih efektif dilakukan. Sebab anak-anak cenderung lebih mudah untuk dikontrol dan diarahkan.

"Jadi sebetulnya edukasi kepada masyarakat itu akan lebih efektif kalau dimulai dari sekolah. Harapannya, anak-anak bisa memberikan inspirasi kepada orangtua di rumah agar mereka mematuhi protokol kesehatan," ujar Muhadjir saat meninjau pelaksanaan PTM di Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur, Rabu (3/11), dikutip dari siaran pers.

Muhadjir menekankan, meski pelaksanaan PTM telah dimulai, tetapi yang paling utama adalah menerapkan disiplin protokol kesehatan memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan (3M).

Pada kesempatan itu, Muhadjir juga mengapresiasi penerapan disiplin protokol kesehatan di MIN Tanjung Redeb, Kabupaten Berau.

"Sebagai satu-satunya MIN di Berau, kepatuhan MIN Tanjung Redeb dalam menerapkan protokol kesehatan layak dijadikan contoh," katanya.

Muhadjir juga meminta agar di tingkat provinsi, PTM juga bisa segera dilaksanakan sesuai instruksi pemerintah melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) 4 Menteri.

"Tapi sebelum memulai atau menambah jumlah peserta PTM, lebih dahulu harus konsultasi dengan Satgas Covid-19 di masing-masing provinsi dan daerah. Selain itu, harus tetap menerapkan disiplin protokol kesehatan secara ketat," ucapnya.

Komisioner KPPI, Retno Listiyarti sebelumnya mengatakan, sebelum sekolah tatap muka dimulai, edukasi mengenai protokol kesehatan (prokes) secara komprehensif dan terus menerus harus ada pada pendidik, tenaga kependidikan, siswa, dan orang tua.

"Edukasi protokol kesehatan juga harus dilakukan kepada orang tua dan guru jug

aharus patuh terhadap prokes. Sebab, murid biasanya akan meniru kebiasaan guru, dalam hal memakai masker misalnya jangan sampai tidak dipakai," ujar Retno dalam Konferensi Pers Pembelajaran Tatap Muka, baru-baru ini.

Hal tersebut bertujuan supaya semua pihak memiliki kesadaran untuk menjalani prokes dalam situasi pandemi.

"Sebelum berangkat ke sekolah, murid dianjurkan untuk tidak berangkat sekolah jika memiliki tanda-tanda Covid-19 supaya tidak menciptakan terjadinya klaster baru," paparnya.

KPPI mendorong Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan provinsi/kabupaten/kota perlu melakukan nota kesepahaman terkait pendamping sekolah dalam PTM. Sekolah perlu mendapat edukasi dan arahan dalam penyusunan protokol kesehatan/SOP AKB di satuan pendidikan.

Selain itu, sekolah dapat mengakses layanan fasilitas kesehatan terdekat ketika ada situasi darurat, misalnya ditemukan kasus warga sekolah yang suhunya di atas 37,3 derajat atau ada warga sekolah yang pingsan saat PTM berlangsung. ● mar



KONSORSIUM PROGRAM INTERNASIONAL PERGURUAN TINGGI VOKASI Dirjen Pendidikan Vokasi Kemendikbudristek Wikan Sakarinto (ketiga kiri) didampingi Direktur Pendidikan Tinggi Vokasi dan Profesi Beny Bandanadja (keenam kanan) berbincang dengan perwakilan perguruan tinggi vokasi saat Peresmian Konsorsium Program Internasional Perguruan Tinggi Vokasi di Indonesia di kawasan Legian, Badung, Bali, Kamis (4/11). Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi menyelenggarakan konsorsium program internasional sebagai upaya percepatan internasionalisasi di lingkup perguruan tinggi vokasi guna melahirkan lulusan yang siap untuk meneruskan studi, bekerja, atau berwirausaha dalam skala internasional.

PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT PERMADANI KHATULISTIWA NUSANTARA ("Perseroan")

Direksi Perseroan dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPS Tahunan") yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 25 November 2021
Waktu : Pukul 13.00 WIB s/d selesai
Tempat : Rajawali Place (d/h Four Seasons Hotel Jakarta) Jl. HR Rasuna Said, Setiabudi, Jakarta Selatan dan Konferensi Video.

Agenda RUPS Tahunan :

1. Persetujuan pemberian dispensasi atas keterlambatan penyelenggaraan RUPS Tahunan Tahun Buku 2020, dan persetujuan Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2020, serta pengesahan Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir tanggal 31 Desember 2020.
2. Persetujuan penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2020.
3. Persetujuan penunjukkan Akuntan Publik untuk Tahun Buku 2021.

Bahan-bahan yang akan dibicarakan dalam RUPS Tahunan telah tersedia di kantor Perseroan sejak tanggal hari ini sampai dengan tanggal RUPS Tahunan diadakan.

Pemanggilan ini dilakukan untuk memenuhi ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Catatan :

1. Para Pemegang Saham Perseroan yang berhak untuk hadir atau diwakili dalam RUPS Tahunan adalah mereka yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan sampai dengan tanggal Pemanggilan RUPS Tahunan ini.
2. Para Pemegang Saham Perseroan yang tidak dapat hadir dalam RUPS Tahunan dapat menunjuk kuasanya untuk hadir dan memberikan suara atas namanya dalam RUPS Tahunan dengan menyerahkan Surat Kuasa yang sah. Anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Karyawan Perseroan diperkenankan untuk bertindak sebagai kuasa dari para Pemegang Saham Perseroan dalam RUPS Tahunan, namun dengan ketentuan bahwa suara yang dikeluarkan oleh mereka selaku kuasa tidak dapat dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan / kuorum dalam RUPS Tahunan.
3. Salinan Surat Kuasa tersebut harus telah diterima oleh Perseroan paling lambat pada tanggal RUPS Tahunan.
4. Asli Surat Kuasa yang diberikan oleh Pemegang Saham Perseroan tersebut dan salinan kartu tanda pengenal dari kuasanya yang sah harus telah diserahkan kepada Perseroan sebelum kuasa tersebut hadir dalam RUPS Tahunan.
5. Demi terselenggaranya RUPS Tahunan secara efisien dan teratur, para Pemegang Saham Perseroan atau kuasa para Pemegang Saham Perseroan dimohon untuk hadir di tempat maupun melalui media konferensi video RUPS Tahunan paling lambat 30 (tiga puluh) menit sebelum RUPS Tahunan dimulai.

Resmi kami,
Direksi PT Permadani Khatulistiwa Nusantara